

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif : Studi Kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang

Elda Lahesti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Edy Akhyary

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Agus Hendrayady

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124

Korespondensi penulis: eldalahestijurn@gmail.com

Abstract. *Inclusive Education is a way to equip children without separation, all of whom deserve a good education. The facts that researchers get in implementing inclusive education policies are the lack of supporting facilities and infrastructure and a lack of teaching staff. This study aims to determine the Implementation of Inclusive Education Policy: Case Study SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG. The method used in this research is qualitative research using two sources of data, namely primary data and secondary data. This study uses policy implementation indicators from Merilee S. Grindle's theory with two indicators, namely policy content and policy environment. The contents of the policy consist of: 1) Affected interest, which is in its interests, namely 12 years of compulsory education and inclusive education goals, 2) Type Of Benefits, the benefits obtained are equal opportunities between children with special needs and their peers, 3) Site Of Decision Making, for the degree of change it is expected that children with special needs have space to mingle with their peers and the community, 4) Site Of Decision Making, TANJUNGPINANG 15 NEGERI Middle School has a shortage of educators to implement inclusive education to the fullest, 5) Program Implementors, program implementers coordinate with each other with related agencies, 6) Resources committed, resources in implementing this policy have a shortage of funds and educators. While the policy environment consists of: 1) Power, Interests, And Strategic Of Actors Innovative, socialization carried out to introduce inclusive education through the media, 2) Institutional And Regime Characteristics, public understanding of inclusive education policies has misunderstandings, 3) Compliance and Responsiveness, This indicator goes according to the ability of the executor and there are deficiencies. From the research results, the success of implementing inclusive education policies is still not optimal even though the benefits of inclusive education policies can be felt by children with special needs so that they can feel competitive with their peers.*

Keywords: *Implementation, Inclusive Education Policy, Children with Special Needs*

Abstrak. Pendidikan Inklusif adalah cara untuk membekali anak-anak tanpa adanya pemisahan, semuanya layak mendapatkan pendidikan yang baik. Fakta yang peneliti dapatkan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan kurangnya tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan indikator implementasi kebijakan dari teori Merilee S. Grindle dengan dua indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan terdiri dari: 1) Kepentingan Kelompok sasaran, yang menjadi kepentingannya yaitu wajib belajar 12 tahun dan tujuan pendidikan inklusif, 2) Tipe Manfaat, manfaat yang diperoleh adalah adanya kesempatan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dan anak sebayanya, 3) Derajat Perubahan Yang Diinginkan, untuk derajat perubahan diharapkan anak berkebutuhan khusus memiliki ruang untuk bergaul dengan anak sebayanya dan Masyarakat, 4) Letak Pengambilan Keputusan, SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memiliki kekurangan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif secara maksimal, 5) Pelaksana Kebijakan, pelaksana program saling berkoordinasi dengan instansi-instansi yang memiliki keterkaitan, 6) Sumber daya Yang Digunakan, sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini memiliki kekurangan dana dan tenaga pendidik. Sedangkan lingkungan kebijakan terdiri dari: 1) Kekuatan, Kepentingan, Dan Strategi actor yang terlibat, sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan pendidikan inklusif melalui media, 2) Karakteristik Lembaga Dan Penguasa, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan inklusif terdapat kesalahpahaman, 3) Kepatuhan dan Daya Tanggap, indikator ini berjalan sesuai dengan kemampuan pelaksana

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 22, 2023; Accepted Agustus 08, 2023

* Elda Lahesti, eldalahestijurn@gmail.com

dan terdapat kekurangannya. Dari hasil penelitian keberhasilan suatu implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih belum optimal meskipun manfaat dari kebijakan pendidikan inklusif sudah bisa dirasakan anak berkebutuhan khusus sehingga bisa merasakan bersaing dengan teman sebayanya.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus

LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif adalah upaya untuk menghilangkan hambatan untuk siswa dan sekaligus meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan untuk semua orang, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus (Safrudin & Qomarudin, 2021). Dengan ini pendidikan inklusif memberikan kesempatan agar anak berkebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama. Berdasarkan statistic pendidikan di Indonesia tahun 2020, untuk penyandang disabilitas, tingkat pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 29,35%, yang menyelesaikan Sekolah Dasar sebanyak 26,32% dan 20,51 % tidak sekolah. Sedangkan untuk yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 9,975, 10,47% atau 3,38%. Dengan angka tersebut memberikan bahwa angka partisipasi Masyarakat mengalami penurunan. Permendikbud Nomor 70 tahun 2007 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa Disabilitas dan Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa dikeluarkan oleh pemerintah (2009). Kota Tanjungpinang berfungsi sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau Indonesia, yang berada di bagian timur laut Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki sekitar 2,064 juta orang yang tinggal di sana. Berikut tabel penyajian data berdasarkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau:

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) di Tanjungpinang saat ini tercatat 18 sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Diantaranya PAUD 3, SD 7, SMP 6, dan SMA 2. Penelitian ini memfokuskan kepada SMP Negeri 15 Tanjungpinang yang merupakan sekolah acuan bagi sekolah inklusif di Kota Tanjungpinang. Fakta yang peneliti temui di lapangan yaitu SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG masih kekurangan dalam tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan sekolah inklusi. Walaupun SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG merupakan sekolah reguler acuan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan sekolah inklusif oleh pemerintah. Sebagai sekolah acuan tentunya memberikan contoh untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Namun SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG dalam menerima anak berkebutuhan khusus menjadikan keterbatasan. Dan anak berkebutuhan khusus yang diterima adalah anak dengan cacat kategori ringan.

Tabel 1. 1 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Di SMP Negeri 15 Tanjungpinang

Kelas	Kategori	Jumlah
7A	1. Autis 2. Tuna Wicara	2 siswa
7B	1. Autis 2. <i>Slow Learners</i> (2 Siswa)	3 siswa
7C	Autis	1 siswa
8B	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
8C	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
9C	<i>Slow Learners</i>	1 siswa
Total		9 siswa

Sumber: SMP Negeri 15 Tanjungpinang, 2023

Masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas (Widodo, 2020). Penyandang disabilitas juga berisiko diintimidasi, didiskriminasi, dilecehkan, dan dicabut hak-haknya (Cherman & Naim, 2022). Selain itu, masih ada persoalan lain seperti kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap hak aksesibilitas. Fakta ini memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang masih terhambat dalam implementasinya. Walaupun ada fasilitas umum yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Namun seperti halnya dalam bidang pendidikan inklusif, karena SMP Negeri 15 TANJUNGPINANG sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan. Oleh karenanya, peneliti mengangkat sebuah judul **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG”**.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi Tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan” (Sawir, 2021).

Pemerintah daerah sangat memperhatikan aspek-aspek kegagalan implementasi berikut ini, (Tresiana & Duadji, 2019):

- a. Isu kebijakan. Ketidakpastian internal atau eksternal, atau kurangnya sumber daya pendukung dapat menyebabkan kegagalan implementasi.
- b. Informasi. Baik pelaksana konten kebijakan maupun hasilnya mungkin kekurangan gambar objek kebijakan karena kurangnya informasi.
- c. Dukungan. Jika kebijakan publik tidak mendapatkan dukungan yang cukup, kebijakan tersebut tidak akan mudah untuk diterapkan.

2. Teori Implementasi Merilee S. Grindle

Grindle menegaskan, “*content*” dan “*context*” kebijakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya (Agustino, 2012, hal. 154–156):

a) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari:

1) *Interest affected* (kepentingan kelompok sasaran)

Kepentingan yang terpengaruh keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan ditentukan oleh kepentingan yang dilindunginya. Dalam hal ini, apakah kebijakan tersebut mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau hanya segelintir individu saja? Suatu kebijakan akan berhasil jika masyarakat sebagai kelompok sasarannya banyak memberikan dukungan. Jika suatu kebijakan melayani kepentingan audiens yang dituju, itu akan mendapat dukungan luas.

2) *Type of benefits* (tipe manfaat)

Jenis manfaat Suatu kebijakan berhasil jika menawarkan banyak manfaat bagi kelompok sasaran dan mendapat banyak dukungan dari kelompok sasaran. Jika suatu kebijakan hanya menawarkan manfaat terbatas kepada khalayak yang dituju, hal ini juga terjadi sebaliknya.

3) *Extent of change evisioned* (derajat perubahan yang diharapkan)

Luasnya perubahan itu jelas Kebijakan yang mencari perubahan signifikan lebih menantang untuk diterapkan. Dalam hal ini, perubahan besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan sulit dicapai.

4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Lokasi pengambilan keputusan Lokasi pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Implementasi kebijakan lebih cenderung gagal jika diimplementasikan jauh dari lokasi pengambilan keputusan.

5) *Program implementors* (pelaksana kebijakan)

Pelaksana Program Pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan. Mereka yang menjalankan kebijakan, tentu saja, akan melihatnya sampai sukses.

6) *Resources committed* (sumber daya yang digunakan)

Sumber Daya yang Berkomitmen Keberhasilan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung untuk implementasi. Jelas, implementasi kebijakan yang berhasil akan diperumit oleh kurangnya sumber daya pendukung.

b) *Context* atau lingkungan kebijakan, yang meliputi:

1) *Power, interests, and strategies of actor involved* (kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor dalam mewujudkannya.

2) *Institution and regime characteristic* (karakteristik Lembaga dan penguasa)

Karakteristik Institusi dan Rezim Keberhasilan kebijakan juga akan ditentukan oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi berdasarkan sifat pemerintahan saat ini.

3) *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap)

Kesesuaian dan daya tanggap Kebijakan akan berhasil jika tujuan dan struktur program konsisten. Jika pelaksana bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan, hal yang sama berlaku.

3. Konsep Kebijakan

Sejalan dengan perkembangan ilmu, William Dunn mengartikan bahwa,

“Kebijakan merupakan perkembangan ilmu sosial dalam pengamalan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, iya mengatakan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.” (Abidin, 2012).

James E. Anderson menyatakan bahwa,

“Public Policies are those Policies Developed by government bodies and officials”. (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah) (Anggara, 2014).

4. Landasan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dalam bidang pendidikan pemerintah mengeluarkan kebijakan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (2009). Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- 1) Menjamin agar peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak membeda-bedakan peserta didik dan mengakui keberagaman.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 9 tentang kesamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas dalam hal seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, berusaha, pelayanan umum, politik, bantuan hukum dan informasi.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik yang dijelaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 38. Aksesibilitas fisik sarana dan prasarana meliputi bangunan umum, jalan umum, angkutan umum, dan pertamanan dan pemakaman umum menurut Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 39. Sedangkan penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 43 meliputi

pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Dan untuk melaksanakan kebijakan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun (2018) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada pasal 25 ayat 3 yang berbunyi

“Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dalam bentuk pendidikan inklusif” dan pada pasal 26.

5. Konsep Pendidikan Inklusif

Hilde Gunn Olsen mengklaim pendidikan inklusif merupakan sekolah mengakomodasi semua siswa, terlepas dari karakteristik fisik, intelektual, sosial, emosional, atau linguistik mereka (Rahmawati, 2019). Adapun pendidikan inklusif dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 didefinisikan sebagai:

“Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar Bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi”.

Tujuan pendidikan memiliki dua tujuan: pertama, mengarahkan semua upaya pendidikan dan kedua, itu adalah sesuatu yang harus dicapai oleh semua upaya pendidikan (Tirtarahardja & Sulo, 2010). Akibatnya, pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi manusia atas pendidikan. Salah satu tujuan praktis dari pendidikan inklusi adalah tujuan yang dapat dirasakan langsung oleh anak, guru, orang tua, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah merupakan penelitian yang berusaha menemukan teori yang berasal dari data (Samnuzulsari, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Tanjungpinang khususnya di SMP Negeri 15 Kota Tanjungpinang. Kebijakan pendidikan inklusif di Kota Tanjungpinang menjadi bahan kajian ini dan yang menjadi objeknya adalah penyandang disabilitas yang menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu, lokasi penelitian ini berada di Kota Tanjungpinang tepatnya di SMP Negeri 15 Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan. Yang dimana SMP Negeri 15 Tanjungpinang merupakan sekolah acuan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan data dari dua sumber yang berbeda yaitu data primer dan data sekunder. Dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari tiga untaian, khususnya reduksi data, *data display* dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, yaitu:

1) *Content* (Isi Kebijakan)

1) *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Sebagai pelaksana Dinas Pendidikan Daerah yang di dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Tanjungpinang. Dan SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusif. Sebagai pelaksana dan penyelenggara Dinas Pendidikan, SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memiliki kepentingan yaitu melaksanakan kebijakan Pendidikan Inklusif yang dilandasi oleh wajib belajar 12 tahun dan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri.

2) *Type Of Benefits* (Tipe Manfaat)

Peneliti telah melakukan observasi terkait manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif. Dengan adanya sekolah inklusif memberikan wadah anak berkebutuhan khusus untuk berbaur dengan anak sebayanya dan dapat bersaing tanpa adanya diskriminasi.

3) *Extent of change* (Derajat perubahan yang diharapkan)

Terkait derajat perubahan yang diinginkan mengharapakan anak berkebutuhan khusus tersebut dapat bersekolah sesuai dengan wajib belajar 12 tahun dan dapat memilih sekolah reguler yang diinginkannya.

4) *Step of decision making* (Letak Pengambilan Keputusan)

SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memiliki kendala dalam sumber daya tenaga pendidikinya yaitu kekurangan peran guru BK dan GPK karena kedua peran guru ini sangat penting dalam menjalankan pendidikan inklusif di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG. Meskipun SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memiliki 4 GPK untuk melaksanakan pendidikan inklusif secara maksimal.

5) *Program implementors* (Pelaksana Program)

Pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan DP3APM, serta saling berkoordinasi dengan Kepala Sekolah reguler lainnya.

6) *Resources committed* (Sumber daya yang digunakan)

Peneliti telah melakukan observasi terkait sumber daya yang digunakan dari pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif. Bahwa SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG kurang sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Seperti toilet khusus penyandang disabilitas dan tangga khusus penyandang disabilitas dan masih banyak lagi sarana pendukung untuk melaksanakan pembelajaran inklusif ini.

2) Lingkungan Kebijakan (*Context of policy*)

Ada 3 indikator dari dimensi ini, yaitu:

1. *Power, Interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan Kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Sosialisasi memang dilakukan namun hanya terdapat dari penyelenggara berupa Dinas pendidikan dan guru-guru dari sekolah reguler. Sosialisasi untuk pemahaman masyarakat masih dilakukan secara media baik media masa, media cetak maupun baliho-baliho dalam lingkup daerah.

2. *Institution and regime characteristic* (karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa)

Karakteristik Lembaga dan penguasa pada pelaksanaan pendidikan inklusif pada SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memberikan pengaruh yang cukup besar. Karena dengan penunjukan SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG sebagai sekolah inklusif, masyarakat mengetahui apa itu inklusif. Walaupun pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif memiliki sedikit kesalah pemahamannya.

3. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Tingkat kepatuhan tenaga pendidik di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG berjalan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka memberikan pelayanan ketika pembelajaran berlangsung. Tapi, Pendidikan Inklusif di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG ini memiliki kekurangan sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif yang tanpa pembedaan. Karena pendidikan inklusif di SMP NEGERI 15

TANJUNGPINANG hanya mampu menerima anak berkebutuhan khusus dengan kateori ringan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi yaitu isi kebijakan dari Merilee S. Grindle berikut ini:

1. Isi kebijakan
 - a. Di dalam kepentingan yang mempengaruhi terdapat beberapa kepentingan, yaitu adanya program wajib belajar 12 tahun, lalu dilatarbelakangi memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anak sehingga anak berkebutuhan khusus dapat bergaul dengan sekitarnya tanpa adanya diskriminasi.
 - b. Tipe manfaat yang diperoleh khususnya bagi pelaksana kebijakan pendidikan inklusif. Dengan adanya pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dan anak sebayanya.
 - c. Terkait derajat perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif memberikan arahan kepada orang tua untuk memasukkan anaknya disekolah reguler. Dengan begitu anak berkebutuhan khusus sudah memiliki tempat memberikan ruang untuk terbiasa bergaul dengan sebayanya dan masyarakat.
 - d. SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG masih kekurangan tenaga pendidik. Seperti kekurangan pada guru BK yang memiliki peran membantu siswanya untuk mengatasi permasalahan dan kekurangan GPK yang merupakan guru yang membimbing dan mencatat kegiatan anak berkebutuhan khusus. Yang artinya SMP Negeri 15 TANJUNGPINANG belum siap secara keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini.
 - e. Pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3APM, serta saling berkoordinasi dengan kepala sekolah lainnya.
 - f. Mengenai sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memiliki kekurangan berupa dana untuk menambahkan sarana dan prasarana pendukung dan tenaga pendidik dalam mewujudkan sekolah inklusif.

2. Lingkungan kebijakan

- a. Sosialisasi memang dilakukan namun hanya terdapat dari penyelenggara berupa Dinas Pendidikan dan guru-guru dari sekolah reguler. Sosialisasi untuk pemahaman masyarakat masih dilakukan secara media baik media masa, media cetak maupun baliho-baliho dalam lingkup daerah.
- b. Karakteristik Lembaga dan penguasa pada pelaksana kebijakan pendidikan inklusif pada SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG memberikan pengaruh yang cukup besar. Karena penunjukan SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG sebagai sekolah inklusif, masyarakat menjadi tahu tentang pendidikan inklusif. Walaupun pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif memiliki kesalahpahaman.
- c. Mengenai tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana Dinas Pendidikan Tanjungpinang mengatakan bahwa upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif sudah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk itu, tentunya pendidikan inklusif yang memiliki tujuan agar tidak ada lagi diskriminasi menjadi gagal. Karena SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG yang sanggup menerima anak berkebutuhan khusus dengan katgori ringan. Yang artinya masih ada terdapat diskriminasi. Hal ini tentunya tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG, sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

- a. Dengan adanya landasan sebagai bentuk dasar melaksanakan pendidikan inklusif tentunya memberikan arah untuk itu. Namun jika dalam pelaksanaannya tidak dibarengi oleh kerja sama dari berbagai pihak tentunya hasil yang diharapkan dari pendidikan inklusif ini tidak dapat tercapai.
- b. SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG menjadi dikenal sebagai sekolah reguler yang menjalankan pendidikan inklusif. Tapi menjadikannya ketidaktahuan masyarakat bahwa pendidikan inklusif itu harusnya telah dijalankan oleh banyak sekolah reguler lainnya.
- c. Perubahan yang diharapkan tentunya tidak dapat berjalan dengan satu pihak, sehingga diperlukan berbagai pihak untuk melaksanakannya. Untuk itu diperlukan semua

sekolah reguler dibina dan dibentuk agar dapat menjalankan kebijakan pendidikan inklusif.

- d. SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif, harusnya diperhatikan lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan contoh kepada sekolah-sekolah lainnya. Seperti menempatkan pembimbing khusus dan guru pembimbing konseling untuk memperhatikan keterbatasan yang anak berkebutuhan khusus memiliki.
- e. Pihak pelaksana terutama Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, sebagai pelaksana perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait pendidikan inklusif untuk terus berkoordinasi dalam melaksanakan pendidikan inklusif dan mencapai hasil yang ingin dicapai.
- f. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harusnya juga dapat perhatian untuk mengatur sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat keterbatasan peserta didik. Dan diperlukan Tindakan tegas dari pemerintah agar kebijakan pendidikan inklusif ini tidak berjalan dengan setengah-setengah.

2. Lingkungan kebijakan

- a. Perlu adanya sosialisasi agar dapat memberikan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan inklusif itu bukannya hanya SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG. Namun juga bagi sekolah reguler yang terdaftar dalam SPPI.
- b. Untuk menjalankan pendidikan inklusif dengan baik perlu adanya dukungan dari pemerintah seperti perhatian dan pengawasan sehingga dapat mengetahui bagaimana perkembangan dalam melaksanakan pendidikan inklusif itu sendiri.
- c. Diperlukan struktur yang jelas dan penganggungjawab dari pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Sehingga dapat dengan jelas arah jalannya kebijakan pendidikan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik* (Muhammad M). Penerbit Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV ALFABETA.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV PUSTAKA SETIA.
- Samnuzulsari, T. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (W. E. Yudiatmaja (ed.)). UMRAH PRESS.

Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik* (hal. 250). CV BUDI UTAMA.

Tirtarahardja, U., & Sulo, L. La. (2010). *PENGANTAR PENDIDIKAN*. Rineka Cipta.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. GRAHA ILMU.

Lainnya

Cherman, & Naim, Y. J. (2022). *Program Generasi Berencana Natuna Sasaran Disabilitas*. ANTARAKEPRI. <https://kepri.antaranews.com/berita/135665/program-generasi-berencana-natuna-sasar-disabilitas>

MENTERIPENDIDIKANNASIONALRI. (2009). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA*.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.

Rahmawati, N. D. (2019). PENERAPAN AKOMODASI PEMBELAJARAN BAGI SISWA SLOW LEARNER KELAS III DI SD NEGERI POJOK SLEMAN. *Widia Ortodidaktika*, 8(7), 662–672.

Safrudin, & Qomarudin, A. (2021). PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD FASTABIQUL KHAIRAT KOTA SAMARINDA. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 121–138.

Widodo, B. (2020). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. Majalah Mediasi. <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>